PENGARUH DISPARITAS CAPAIAN PENDIDIKAN TERHADAP DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2019

The Impact Of Educational Inequality On Income Inequality In Indonesia 2012-2019

Dinta Lutfiani¹, Aisyah Fitri Yuniasih²

STIS
STIS

Jl. Jebung Dalam Selindung Baru, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung
E-mail: 111709637@stis.ac.id

ABSTRAK

Disparitas distribusi pendapatan masih menjadi suatu masalah yang dihadapi negara berkembang khususnya Indonesia. Target RPJMN mengenai ketimpangan masih belum tercapai di tahun 2019. Oleh karena itu, upaya lebih dari pemerintah harus direalisasikan. Salah satu upaya yang dapat menekan disparitas adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Akan tetapi, pendidikan di Indonesia terdeteksi masih terdapat ketimpangan dalam capaian pendidikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disparitas capaian pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Selain itu, variabel bebas lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal juga akan dianalisis pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan *cross section* 33 provinsi di Indonesia. Model yang digunakan adalah *fixed effect model* dengan metode estimasi FGLS-SUR. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa disparitas capaian pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan pada tingkat signifikansi lima persen. Disparitas capaian pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal dapat menjelaskan 91,5 persen disparitas distribusi pendapatan di Indonesia.

Kata kunci: disparitas, pendapatan, pendidikan, ekonomi, fiskal

ABSTRACT

Disparity in income distribution is still a problem faced by developing countries, especially Indonesia. The RPJMN target regarding inequality has yet to be achieved in 2019. Therefore, more efforts from the government must be realized. One of the efforts that can reduce disparity is through improving the quality of education. However, education in Indonesia has detected gaps in educational attainment. This study aims to analyze the effect of disparities in educational attainment on disparities in income distribution in Indonesia. In addition, other independent variables such as economic growth and fiscal decentralization will also be analyzed for their effects on income inequality. The analysis used is panel data regression with a cross section of 33 provinces in Indonesia. The model used is the fixed effect model with the FGLS-SUR estimation method. The results of the study indicate that disparities in educational attainment, economic growth and fiscal decentralization have a significant effect on disparities in income distribution at the five percent significance level. Disparities of educational attainment, economic growth and fiscal decentralization can explain 91.5 percent of the disparity in income distribution in Indonesia.

Keywords: *disparity, income, education, economy, fiscal*

PENDAHULUAN

Pemerataan pendapatan antara golongan atas dan golongan bawah semakin tidak adil seiring berjalannya waktu (Todaro, 2006). Ketidaksetaraan pendapatan yang terus meningkat di banyak bagian dunia menyebabkan penekanan ketimpangan menjadi salah satu tujuan dalam SDGs. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian seluruh negara, terutama Indonesia sebagai negara berkembang. Hal ini dikarenakan pemerataan pendapatan merupakan salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat ternyata masih belum berdampak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menekan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien gini Indonesia di tahun 2019 yang belum memenuhi target RPJMN 2015-2019 sebesar 0.37 dan juga mengalami perlambatan dalam penurunannya. Koefisien gini Indonesia tahun 2012-2019 berada di rentang 0.382 sampai 0.414 yang mengindikasikan distribusi pendapatan Indonesia masuk ke dalam kategori sedang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pendidikan. Indonesia telah menerapkan sistem wajib belajar 9 tahun yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1). Akan tetapi, hingga 2018 rata lama sekolah (RLS) Indonesia masih belum menyentuh angka 9 tahun. Setelah diusut lebih dalam, ternyata masih terdapat lebih dari 70 persen provinsi di Indonesia yang memiliki rata lama sekolah kurang dari 9 tahun. Akan tetapi, terdapat segelintir provinsi seperti DKI Jakarta yang memiliki rata lama sekolah yang cukup tinggi, yakni 11 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan dalam capaian pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti gambaran dari disparitas distribusi pendapatan di Indonesia dan kaitannya dengan disparitas capaian pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, desentralisasi fiskal dan kemiskinan serta pengaruh disparitas capaian pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, desentralisasi fiskal dan kemiskinan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Ananda dan Pulungan (2018) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal yang digambarkan oleh total APBD juga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan serta penelitian Kanwal & Munir (2015) yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Asia Selatan.

METODE

Disparitas Capaian Pendidikan dan Disparitas Distribusi Pendapatan

Pendidikan merupakan suatu unsur penghubung untuk segala permasalahan menyangkut Sumber daya manusia penting dalam mempengaruhi tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonominya (Connolly, 2004). Keterbatasan dalam bidang pendidikan akan menjadi hambatan dalam memperoleh kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi (Sanz, Peris, & Escámez, 2017). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan setidaknya 20 persen dari APBN untuk pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat terhadap disparitas distribusi pendapatan dengan meningkatkan produktivitas pendapatan di bidang pertanian juga membantu menyerap tenaga kerja ke dalam industri modern. Shahpari dan Davoudi (2013) mengungkapkan bahwa penambahan modal manusia dapat membuat distribusi pendapatan di suatu wilayah semakin merata dalam waktu panjang. Apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, umumnya akan memiliki kesempatan lebih besar dalam memperoleh pendapatan yang tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan rendah. Oleh karena itu, jika pendidikan di suatu negara mengalami ketimpangan, maka disparitas distribusi pendapatannya diperkirakan akan tinggi juga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa disparitas capaian pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap disparitas distribusi pendapatan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut hipotesis yang dikemukakan Simon Kuznets, di awal tahap pembangunan ekonomi distribusi pendapatan akan semakin timpang, namun setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan semakin merata (Kuncoro, 2010). Studi yang dilakukan Ravallion & Datt (1996) menemukan bahwa di India selama periode 1950-1990 pendapatan rata-rata perkapita meningkat di sisi lain ketimpangan pendapatan mengalami penurunan. Wahyuni (2004) menemukan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh secara negatif terhadap disparitas distribusi pendapatan.

Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Distribusi Pendapatan

Anggaran total belanja APBD digunakan untuk merepresentasikan sektor fiskal. Sianturi (2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka disaat pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan mendorong penerimaan daerah yang merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat. Derajat desentralisasi fiskal yang meningkat di masing-masing daerah secara bertahap akan mendorong pemerataan wilayah.

Selain itu, Irawan (2014) juga menguraikan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan ketimpangan spasial atau ketimpangan pendapatan karena potensi biaya yang terkait dengan kapasitas kelembagaan, kualitas pemerintah dan dana sosial ekonomi. Ketimpangan spasial sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah, sebab ketimpangan spasial dapat memengaruhi ketimpangan yang menyeluruh serta dapat berdampak negatif bagi masyarakat, stabilitas sosial dan politik. Dari beberapa teori dan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pandangan berbeda mengenai pengaruh desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan, yaitu desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan pendapatan sedangkan di sisi lain berpendapat bahwa desentralisasi fiskal justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Metodologi

Ruang lingkup penelitian ini mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan data *time series* 2012 hingga 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun variabel yang diperoleh dari website resmi BPS adalah koefisien gini, PDRB ADHK dan gini pendidikan. Sedangkan variabel yang diperoleh dari website DJPK Kemenkeu adalah anggaran total belanja APBD.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*) (Basuki, 2016). Dengan memasukkan variabel-variabel penelitian ini dan model log-log ke dalam persamaan atau formula data panel, maka formula tersebut dapat ditulis sebagai berikut.

$$\ln GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRB_{it} + \beta_2 \ln DF_{it} + \beta_3 \ln KGP_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

$\ln GR_{it}$ = logaritma natural koefisien gini menurut provinsi i pada tahun t (disparitas pendapatan).

$LnPDRB_{it}$ = merupakan logaritma natural PDRB ADHK menurut provinsi i pada tahun t (pertumbuhan ekonomi).

$LnDF_{it}$ = merupakan logaritma natural realisasi total belanja APBD menurut provinsi i pada tahun t (total belanja).

$LnKGP_{it}$ = merupakan logaritma natural gini pendidikan menurut provinsi i pada tahun t .

β_0 = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope

u_{it} = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Disparitas Distribusi Pendapatan

Disparitas distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi dimana pembagian hasil pembangunan suatu wilayah tidak merata di kalangan penduduknya atau timpang. Dalam mengukur disparitas distribusi pendapatan, salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah koefisien gini atau *gini ratio*. Koefisien gini merupakan suatu pengukuran yang didasarkan pada kurva Lorenz yang berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020, diolah

Gambar 1. Grafik perkembangan koefisien gini Indonesia tahun 2012-2019

Gambar 1 menampilkan laju koefisien gini Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019. Pada periode tersebut, tercatat koefisien gini Indonesia berkisar dari 0,382 hingga 0,413 yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan Indonesia mengalami ketimpangan yang sedang. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa nilai dari koefisien Indonesia cenderung menurun walaupun mengalami sedikit fluktuasi. Koefisien gini yang tinggi pada tahun 2013 disebabkan oleh konsumsi golongan atas mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan masyarakat golongan bawah. Peningkatan konsumsi masyarakat golongan atas pada saat itu disebabkan oleh kenaikan harga komoditas serta struktur dari pertumbuhan ekonomi yang lebih bias ke sektor jasa.

Sejak tahun 2016, koefisien gini Indonesia terus menurun hingga menyentuh angka 0,382 pada tahun 2019, akan tetapi masih belum memenuhi target RPJMN yakni sebesar 0,37.

Penurunan koefisien gini disebabkan masyarakat lapisan terbawah mengalami kenaikan pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan lapisan di atasnya. Peningkatan pengeluaran pada 40 persen masyarakat lapisan bawah tercatat mencapai 2,83 persen. Koefisien gini yang secara umum cenderung menurun pada periode ini dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan dalam meningkatkan kesetaraan pendapatan semakin meningkat terutama dalam lima tahun terakhir.

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Salah satu indikator yang paling sering digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering menjadi target terkait perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019, diolah

Gambar 2. Grafik pertumbuhan ekonomi menurut provinsi di Indonesia tahun 2019

Berdasarkan **Gambar 2** di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2019 cukup pesat, hal ini dibuktikan oleh lebih dari 60 persen jumlah provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar yaitu sebesar 7,15 persen. Akan tetapi, Papua pada tahun 2019 justru mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar minus 15,72 persen dari tahun sebelumnya. Secara umum, penurunan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2019 disebabkan oleh penurunan produksi pertambangan akibat transisi tambang terbuka ke tambang bawah tanah (BI, 2020).

Gambaran Disparitas Capaian Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas dari sumber daya manusia di suatu wilayah. Pendidikan yang baik akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik juga, sehingga taraf hidup masyarakat di suatu wilayah juga dapat meningkat. Akan tetapi, adanya ketimpangan yang terjadi dalam sektor pendidikan akan menimbulkan masalah. Pendidikan tinggi yang hanya dapat dirasakan kelompok orang tertentu akan menciptakan kesenjangan baru dalam kualitas sumber daya manusianya. Hal ini juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan capaian pendidikan dapat diukur dengan indikator koefisien gini pendidikan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, SUSENAS 2019, diolah
Gambar 3. Grafik nilai KGP menurut provinsi tahun 2019

Perbedaan kondisi ketimpangan capaian pendidikan diantara KBI dan KTI disebabkan oleh mendominasinya ketimpangan pendidikan oleh provinsi KTI. **Gambar 3** menunjukkan bahwa pada 2019 masih terdapat 12 provinsi yang memiliki KGP di atas nasional, di mana dari kedelapan provinsi tersebut didominasi oleh KTI. Provinsi-provinsi yang memiliki KGP di atas nasional tersebut adalah Papua, NTB, NTT, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung dan Bali. Papua memiliki KGP tertinggi sebesar 0,4683 yang berarti ketimpangan capaian pendidikannya sedang. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki KGP terendah sebesar 0,1902 yang berarti capaian pendidikannya merata.

Gambaran Umum Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Total belanja daerah digunakan sebagai representasi dari sektor fiskal suatu wilayah. Anggaran biaya yang tinggi diharapkan dapat dialokasikan dengan baik untuk pembangunan di suatu wilayah.

Sumber: DJPK Kemenkeu 2019, diolah
Gambar 4. Grafik sebaran APBD menurut provinsi tahun 2019

Perbedaan total anggaran belanja KBI yang jauh lebih tinggi dibandingkan KTI dapat dijelaskan oleh data yang digambarkan oleh **Gambar 4**. Terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia khususnya KTI memiliki anggaran belanja di bawah rata-rata. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki total anggaran belanja yang jauh di atas rata-rata, begitu pula dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa total anggaran belanja nasional yang besar hanya didominasi oleh beberapa provinsi saja khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sedangkan sebagian besar provinsi-provinsi lainnya hanya menjadi sebagian kecil dari total anggaran belanja nasional.

Selain itu, terlihat juga bahwa seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan anggaran belanja APBD dari tahun 2012-2019. Peningkatan anggaran terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan anggaran sebesar 47 triliun rupiah. Sementara itu, peningkatan anggaran terendah terjadi di Provinsi Gorontalo dengan peningkatan anggaran hanya sebesar 857 miliar rupiah.

Hasil Estimasi Model Terbaik

Dalam analisis ini model yang dihasilkan menggunakan model FEM dengan metode estimasi FGLS-SUR. Ringkasan pengolahan model ditampilkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 1. Ringkasan signifikansi persamaan regresi

Variabel	Koefisien	Koefisien Standardized	Std. Error	Uji Statistik	Prob	t tabel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C	6,227		1,037	6,005	0,0000	1,652
Log(PDRB)	-0,274	5,227	0,045	-6,133*	0,0000	
Log(DF)	0,065	0,500	0,018	3,578*	0,0004	
Log(KGP)	0,172	5,300	0,072	2,390*	0,0177	

*signifikan pada tingkat signifikansi 5%

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan

Laju pertumbuhan ekonomi yang pada penelitian ini digambarkan oleh besarnya PDRB ADHK, selama periode 2012-2019 pada tingkat signifikansi lima persen memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Nilai koefisien PDRB sebesar -0,274389, artinya setiap pertambahan satu persen PDRB akan menurunkan sebesar 0,274389 persen rasio gini Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan.

Son (2016) menyatakan bahwa terdapat tiga kerangka teori yang mendasari korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan. Teori pertama adalah teori ketidaksempurnaan pasar kredit yang difokuskan untuk menganalisis jumlah hambatan yang dihadapi oleh kelompok penghasilan rendah dalam sektor finansial, sehingga mereka akan terjebak di dalam kelompok penghasilan rendah. Kedua, teori ekonomi politik di mana ketidaksetaraan ekonomi mengarah pada kebijakan redistribusi yang terdistorsi. Keadaan ini dapat mengurangi insentif tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Terakhir, pandangan terhadap ketidakstabilan sosial-politik negara, bahwa adanya ketidaksetaraan kekayaan dan ketimpangan pendapatan mengakibatkan ketidakstabilan dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agusalm (2016) yang mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap indeks gini sebelum diterapkan desentralisasi fiskal. Penelitian yang dilakukan Yasa (2015) di Bali juga mendapati hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antardaerah.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Dsitribusi Pendapatan

Desentralisasi fiskal yang digambarkan oleh anggaran total belanja APBD 2012-2019, pada tingkat signifikansi lima persen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Koefisien sebesar 0,064858 menunjukkan bahwa setiap pertambahan satu persen anggaran total belanja APBD dapat meningkatkan koefisien gini sebesar 0,064858 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian, yaitu desentralisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Tiebout (1956) memiliki hasil penelitian yang sejalan, yaitu terdapat hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan wilayah melalui sifat mobilitas pajak.

Pengaruh Disparitas Capaian Pendidikan Terhadap Disparitas Dsitribusi Pendapatan

Disparitas capaian pendidikan yang diukur menggunakan gini pendidikan pada periode 2012-2019 pada tingkat signifikansi lima persen berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia dengan koefisien sebesar 0,172488. Artinya, kenaikan KGP sebesar satu persen akan meningkatkan koefisien gini sebesar 0,172488 persen. Selain itu, nilai *standardized coefficient* KGP sebesar 5,3 lebih besar dibandingkan *standardized coefficient* variabel independen lainnya, yang berarti disparitas capaian pendidikan memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan variabel independen lain terhadap disparitas distribusi pendapatan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian ini, yaitu disparitas capaian pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Hasil yang sejalan juga dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan Saifuddin (2014) juga melakukan penelitian serupa di Jawa Barat periode 2007-2012. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan menggunakan pendekatan panel EGLS, gini pendidikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian oleh Pectu (2014) juga mendukung hasil yang sama dengan meneliti 119 negara maju dan berkembang. Penelitian ini menyimpulkan hasil bahwa ketimpangan pendidikan secara signifikan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di negara maju.

Adanya keterbatasan dalam hal pendidikan akan menyebabkan terhambatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Sanz, Periz dan Escamez, 2017). Kemudian Mesami (2010) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa status pendidikan dalam negara-negara islam akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, apabila status capaian pendidikan suatu daerah mengalami ketimpangan, maka untuk kelompok dengan status capaian pendidikan terendah akan terhambat dalam mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga akan ikut menurunkan tingkat pendapatan kelompok tersebut. Sebaliknya, pada kelompok dengan status pendidikan tertinggi akan mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan data panel dengan model *fixed effect* menggunakan metode estimasi FGLS SUR, maka didapat kesimpulan bahwa disparitas distribusi pendapatan di Indonesia periode 2012-2019 berada di rentang 0,382-0,413 termasuk kategori ketimpangan sedang dan belum memenuhi target RPJMN 2015-2019 sebesar 0,37. Terdapat lebih dari 27 persen provinsi di Indonesia memiliki koefisien gini yang belum memenuhi target RPJMN. Disparitas capaian pendidikan di Indonesia periode 2012-2019 termasuk kategori relatif merata yang berada di rentang 0,315-0,34. Akan tetapi, masih terdapat lebih dari 36 persen provinsi yang memiliki koefisien gini pendidikan di atas gini pendidikan nasional, seperti Papua, NTB dan NTT yang memiliki KGP lebih dari 4. Disparitas capaian pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Hubungan positif yang terbentuk berarti bahwa ketimpangan capaian pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan ketimpangan dsitribusi

pendapatan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam menekan disparitas distribusi pendapatan, sementara itu desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia dan memiliki korelasi yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, Lestari. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia. *KINERJA*, Vol 20 No.1 Hal 53-68.
- Ananda, C.F & Abdul M.P. (2018). Determinant of Income Inequality in Indonesia: Study Case 33 Provinces in 2011-2016. *International Academic Conference, Vienna*, ISBN 978-80-87927-83-0.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Pengeluaran 2012-2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha 2015-2019. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Gini Ratio Provinsi 2002-2020. *BPS* 17 Juli 2020. 10 Juni 2020. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2020.html>
- Connolly, M. (2004). Human Capital and Growth in the Postbellum south: A Separate but Unequal Story. *The Journal of Economic History*. 64(2), 363-399.
- DJPK Kementerian Keuangan. (2019). Anggaran dan Realisasi APBD. 1 Juli 2020. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Irawan, A. (2014). *Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralization* [Disertasi]. Urbana: University of Illinois.
- Kanwal, A & Munir, K. 2015. The Impact of Educational and Gender Inequality on Income Inequality in South Asia. *MPRA Paper*. No. 66661.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*. 45: 1-28.
- Pecteu, C. (2014). Does Educational Inequality Explain Income Inequality Across Countries?. *Honors Projects*. Paper 125.
- Ravallion, M & Datt, G. (1996). How Important to India's Poor is The Sectoral Composition of Economic Growth?. *World Bank Economic Review*. 10 (1), 1-25.
- Saifuddin. (2014). *Pengaruh Ketimpangan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat* [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sanz, R, Peris, J.A & Escamez J. (2017). Higher Education in The Fight Against Poverty From The Capabilities Approach: The Case of Spain. *Journal of Innovation & Knowledge*, 2(2), 53-56.
- Shahpari, G & Davoudi, P. (2013). Studying Effects of Human Capital on Income Inequality in Iran. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 109(2014), 1386-1389.
- Sianturi, Y. Simonsen (2008). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. Diakses pada tanggal 11 Juni 2020 melalui <http://eprints.undip.ac.id/29289/1/Jurnal.pdf>
- Son, J.C & Lee, D.J (2016). Economic Growth and Income Inequality: Evidence from Dynamic Panel Investigation. *Global Economic Review*, Vol.45 No.4, 331-358. Diakses pada tanggal 11 Juni 2020 melalui <https://doi.org/10.1080/1226508X.2016.1181980>
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan edisi 2*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Tiebout, C. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64 pp 416-424.
- Todaro, M.P & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Ed ke-9. Jakarta: Erlangga.

- Wahyuni, H. (2004). Is There A Link Between Increased Growth and Reduced Income Inequality? Analysis of Cross-Country Studies. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. Vol 1, No.1, Februari hal 1-9.
- Yasa, I Komang. O. A & Arka, Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 8 No.1.